Manual Indikator Kinerja

Sekretariat Utama 2023

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 1.1 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

ESA SEKRETARIS UTAMA KEPEGAWAIAN

NEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Utama BKN, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara tentang Penetapan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara Tahun 2023;

.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 80);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 31 Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PENETAPAN PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2022.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE

Balai Sertifikasi Elektronik

Pasal 1

(1) Penetapan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara sebagai penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara ini.

(2) Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara dalam menyusun perencanaan kinerja dan anggaran, pengukuran kinerja dan anggaran, pelaporan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja dan anggaran sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 2

Masing-masing Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara wajib:

1) Menyusun Perencanaan Strategis menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* yang diimplementasikan secara komprehensif pada semua level unit organisasi, satuan kerja dan kantor regional BKN.

2) Menyusun Peta Strategis dan IKU di lingkungan unit kerja, yang tertuang ke dalam manual IKU, sekurang- kurangnya menginformasikan definisi, formula pengukuran, pihak penanggung jawab, dan sumber data, atau yang diatur kemudian dalam manajemen kinerja organisasi BKN.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Balai Sertifikasi Elektronik

3) Melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pencapaian kinerja IKU di lingkungan unit kerja masing-masing sekurang-kurangnya pada setiap triwulan; dan

4) Menyiapkan data target, realisasi, capaian, serta informasi kinerja yang memadai bagi penanggung jawab atau pihak penyedia data dari unit organisasi, satuan kerja, dan kantor regional BKN masing- masing yang memiliki kontribusi atas IKU Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 3

Keputusan Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2023

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Ditandatangani Secara Elektronik
Hj. Imas Sukmariah, S.Sos., MAP.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Balai Sertifikasi Elektronik

PETA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2020-2024

VISI : Mewujudkan Pengelola Manajemen ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk Mendukung Tercapainya Indonesia Maju

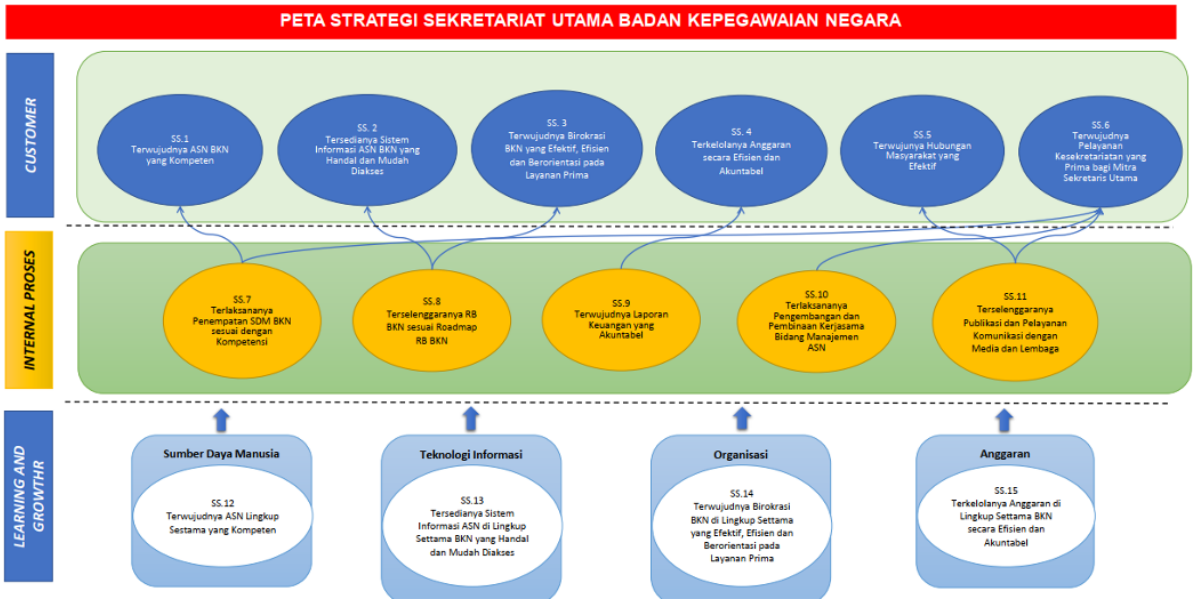

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA		TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Profesional ASN BKN	77	77	80	80	80
2.	Indeks Maturitas SPBE BKN	3	3.2	3.5	3.7	4

3.	Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN	80	81	82	83	85
4.	Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN	75	77	79	80	85
5.	Level Maturitas SPIP	3	3	4	4	4
6.	Nilai Pelaksanaan Sistim Merit BKN	350	360	370	380	390
7.	Indeks Pengelolaan Aset	N/A	N/A	N/A	3,2	3,2
8.	Indeks Tata Kelola PBJ	N/A	N/A	N/A	80,6	80,6
9	Nilai Hasil Audit Kearsipan dari ANRI	70	70	80	75	75
10.	Opini atas Laporan Keuangan BKN	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11.	Nilai Predikat Indikator Kinerja Pelaksanaan APBN (IKPA)	80	82	84	93	93
12.	Persentase Capaian Rerata Jangkauan Publikasi Per Media BKN	90%	92%	93%	94%	95%
13.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	-	80 (Menujur Informatif)	81 (Menujur Informatif)	91 (Informatif)	91 (Informatif)
14.	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Sekretaris Utama	85	86	87	88	95
15.	Persentase Penempatan Pegawai Sesuai dengan Kompetensinya	90%	91%	92%	93%	95%

16.	Persentase Program dan Kegiatan RB yang Dilaksanakan Dibanding Jumlah Program dan Kegiatan yang Harus Dilaksanakan Sesuai *Road Map* RB per Tahun	100%	100%	100%	100%	100%
17.	Persentase Kualitas Laporan Keuangan BA 088	100%	100%	100%	100%	100%
18.	Persentase Dokumen Kerjasama yang Disepakati	92%	92%	92%	95%	95%
19.	Persentase Jumlah Publikasi Program dan Kegiatan BKN Melalui Media dan Lembaga Stakeholder Lainnya	95%	98,3%	98,3%	98,3%	98,3%
20.	Indeks Profesional ASN Settama BKN	80	80	81	81	82
21.	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar di Lingkup Settama	65%	100%	100%	100%	100%
22.	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komponen Pengungkit di Lingkup Settama BKN	36	36	36	36	36
23.	Skor Atas Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara	84	84	85	80	86
24.	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkup Settama BKN	98%	98%	100%	100%	100%
25.	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat	100%	100%	100%	100%	100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA

SEKRETARIAT UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Perspektif	*Customer Perspective*
Sasaran Strategis	SS1. Terwujudnya ASN BKN yang kompeten
Deskripsi Sasaran Strategis	Definisi: Terwujudnya ASN BKN yang kompeten bermakna bahwa Sekretariat Utama menerima mandat sebagai unit yang berfungsi mewujudkan ASN BKN yang memiliki kompetensi tinggi, profesional dalam bekerja dan memiliki integritas dalam menjalankan tugasnya.
Indikator Kinerja Utama	**IKU.1 Indeks Profesional ASN BKN**
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Definisi
	Suatu ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN BKN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisplinan pegawai ASN BKN dalam menjalankan tugas jabatan. Sesuai dengan definisinya, Indeks Profesionalitas ASN BKN ini diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi: 1. Kualifikasi 2. Kompetensi 3. Kinerja 4. Disiplin Adapun pengkategorian tingkat profesionalitas ASN BKN sebagai berikut: a. Nilai 91-100 (sangat tinggi) b. Nilai 81-90 (tinggi) c. Nilai 71-80 (sedang) d. Nilai 61-70 (rendah) e. Nilai 0-60 (sangat rendah) Pengukuran indeks profesionalitas ASN ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
	Formula

	$$IP = \sum_{i=1}^{4} IP_i = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$ $$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$ $$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$ $$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$ $$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator			
Tujuan	1. Sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat profesionalitas sebagai pegawai ASN BKN 2. Sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional 3. Sebagai instrumen kontrol sosial agar pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan public			
Satuan Pengukuran	Indeks			
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/ Output	(X) Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	() Outcome		(X) Outcome Antara	() Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading
Metode Cascading	(X) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Buat baru
Unit Penanggung Jawab IKU	Biro Sumber Daya Manusia			
Sumber Data	Laporan Hasil Pengukuran Indeks Profesional ASN di BKN (Berdasarkan hasil perhitungan mandiri Indeks Profesional dan data dari aplikasi IP-JASN)			

Jenis Perhitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(X) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maksimize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
Risiko	Diklat PKA/PKP, Fungsional dan Teknis 20 JP belum dilaksanakan			
Mitigasi Risiko	1. Penyesuaian antara kebutuhan diklat jabatan dan jabatan 2. Pelaksanaan diklat teknis fungsional 3. Dilakukan pelaksanaan CMB di internal di lingkungan BKN			

Tabel Realisasi

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
77	70,42	77	78,42	80	76,18	80	-	80	-

Perspektif	*Customer Perspective*			
Sasaran Strategis	SS.2 Tersedianya Sistem Informasi ASN BKN yang handal dan mudah diakses			
Deskripsi Sasaran Strategis	Definisi: Tersedianya sistem informasi BKN yang handal dan mudah diakses menggambarkan sistem informasi di internal BKN yang terintegrasi, efektif dan efisien yang mampu memberi dampak yang luas bagi tercapainya tujuan organisasi.			
Indikator Kinerja Utama	**IKU.2 Indeks Maturitas SPBE BKN**			
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Definisi			
	Indeks maturitas SPBE BKN merupakan hasil evaluasi SPBE untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE dalam rangka memastikan pertumbuhan penerapan SPBE di BKN yang dilakukan oleh KemenpanRB. SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) merupakan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penerima layanan. Penilaian SPBE ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kategori indeks SPBE sebagai berikut: < 1,8 : kurang 1,8 – 2,6 : cukup 2,6 – 3,5 : baik 3,5 – 4,2 : sangat baik 4,2 – 5,0 : memuaskan			
	Formula			
	Nilai indeks yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			
Tujuan	1. Mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE di BKN 2. Meningkatkan kualitas penerapan SPBE di BKN 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di BKN			
Satuan Pengukuran	Indeks			
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/ Output	(X) Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	() Outcome		(X) Outcome Antara	() Output Kendali Rendah

Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading
Metode Cascading	(X) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Buat baru
Unit Penanggung Jawab IKU	Biro Perencanaan dan Organisasi			
Sumber Data	Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik BKN oleh KemenpanRB			
Jenis Perhitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	() Hasil perhitungan raw data		(X) Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maksimize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
Risiko	Tidak terpenuhinya nilai indeks maturitas SPBE mengindikasikan ketidakpatuhan BKN terhadap Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, kurang mendukung tujuan strategis SPBE tahun 2018 - 2025 dan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025			
Mitigasi Risiko	Penguatan kebijakan yang mendukung pelaksanaan SPBE dan melaksanakan monev secara berkala			

Tabel Realisasi

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
3	2.84	3.2	2.92	3.5	2.92	3.7	-	4	-

Perspektif	*Customer Perspective*
Sasaran Strategis	SS.3 Terwujudnya birokrasi BKN yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
Deskripsi Sasaran Strategis	Definisi: Terwujudnya birokrasi BKN yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima menggambarkan birokrasi BKN yang mampu bekerja dengan kelembagaan yang tertata, sistematis dan mampu melakukan efisiensi terutama pada aspek penganggaran. Pada akhirnya, kelembagaan yang berkualitas tersebut memacu peningkatan pelayanan
Indikator Kinerja Utama	**IKU.3 Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN**
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Definisi
	Suatu ukuran yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi di BKN yang dilakukan oleh KemenpanRB. Makna reformasi birokrasi adalah: 1. Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan 2. Pertaruhan besar organisasi dalam menghadapi tantangan abad ke-21 3. Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang cukup besar 4. Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa 5. Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintahan, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru
	Formula
	Hasil penilaian oleh KemenpanRB yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN
Tujuan	Menciptakan birokrasi BKN yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
Satuan Pengukuran	Indeks

Jenis Aspek Target	() Kuantitas/ Output	(X) Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	() Outcome		(X) Outcome Antara	() Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading
Metode Cascading	(X) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Buat baru
Unit Penanggung Jawab IKU	Biro Perencanaan dan Organisasi			
Sumber Data	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN oleh KemenpanRB			
Jenis Perhitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	() Hasil perhitungan raw data		(X) Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maksimize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
Risiko	Tidak tercapainya target nilai indeks pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN			
Mitigasi Risiko	Pelaksanaan monev berkala terhadap tindak lanjut capaian kinerja triwulanan			

Tabel Realisasi

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
80	76.86	81	76.27	82	77.29	83	-	85	-

Perspektif	*Customer Perspective*
Sasaran Strategis	SS.3 Terwujudnya birokrasi BKN yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
Deskripsi Sasaran Strategis	Definisi: Terwujudnya birokrasi BKN yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima menggambarkan birokrasi BKN yang mampu bekerja dengan kelembagaan yang tertata, sistematis dan mampu melakukan efisiensi terutama pada aspek penganggaran. Pada akhirnya, kelembagaan yang berkualitas tersebut memacu peningkatan pelayanan
Indikator Kinerja Utama	**IKU.4 Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN**
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Definisi
	● Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) merupakan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). ● Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. ● SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja di BKN. ● Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja BKN menggambarkan penilaian atas implementasi SAKIP di BKN yang dilakukan oleh KemenpanRB dengan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
	Formula
	Hasil penilaian oleh KemenpanRB yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja BKN oleh KemenpanRB
Tujuan	1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP di BKN 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP di BKN 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja

	4. Memperoleh saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP di BKN 5. Menyusun rencana tindak lanjut implementasi SAKIP atas hasil penilaian periode sebelumnya			
Satuan Pengukuran	Nilai			
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/ Output	(X) Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	() Outcome		(X) Outcome Antara	() Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading
Metode Cascading	(X) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Buat baru
Unit Penanggung Jawab IKU	Biro Perencanaan dan Organisasi			
Sumber Data	Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja BKN oleh KemenpanRB			
Jenis Perhitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	() Hasil perhitungan raw data		(X) Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maksimize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
Risiko	1. Rekomendasi hasil evaluasi kinerja belum ditindaklanjuti dan dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan 2. Pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan			
Mitigasi Risiko	1. Fasilitasi dan pendampingan Tim Akuntabilitas Kinerja dalam monitoring dan evaluasi kinerja setiap triwulan 2. Pembuatan aplikasi manajemen kinerja organisasi			
Tabel Realisasi				

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
75	67.33	77	68.05	79	68.48	81	-	85	-

Perspektif	*Customer Perspective*
Sasaran Strategis	SS.3 Terwujudnya birokrasi BKN yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
Deskripsi Sasaran Strategis	Definisi: Terwujudnya birokrasi BKN yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima menggambarkan birokrasi BKN yang mampu bekerja dengan kelembagaan yang tertata, sistematis dan mampu melakukan efisiensi terutama pada aspek penganggaran. Pada akhirnya, kelembagaan yang berkualitas tersebut memacu peningkatan pelayanan.
Indikator Kinerja Utama	**IKU.5 Level Maturitas SPIP**
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Definisi

Tingkat Maturitas (*Maturity Level*) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menggambarkan tingkatan atau struktur kematangan penyelenggaraan SPIP dengan karakteristik yang berbeda antara satu tingkat dengan tingkat lainnya.

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: **belum ada**, **rintisan, berkembang, terdefinisi, terkelola dan terukur, optimum**. Tingkatan dimaksud setara masing-masing dengan level 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah.

Formula

Formula penilaian sesuai dengan **Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021** tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

No.	Tingkat Maturitas	Interval Skor
1.	Rintisan	1,0 ≤ Skor < 2,0
2.	Berkembang	2,0 ≤ Skor < 3,0
3.	Terdefinisi	3,0 ≤ Skor < 4,0
4.	Terukur dan Terkelola	4,0 ≤ Skor < 4,5
5.	Optimum	≥ 4,5

Tujuan	Untuk mengetahui sejauh mana tingkat penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.			
Satuan Pengukuran	Level			
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/ Output	(X) Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung	() Dipersempit	(X) Komponen Pembentuk	() Buat baru
Unit Penanggung Jawab IKU	Inspektorat dan Biro Perencanaan dan Organisasi			
Sumber Data	Laporan Hasil Penilaian Maturitas SPIP dari BPKP			
Jenis Perhitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	() Hasil perhitungan raw data		(X) Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
Risiko	1. Potensi lingkungan pengendalian tidak berjalan secara optimal 2. Potensi ketidaktepatan penilaian risiko yang disusun oleh tim UPR 3. Potensi kegiatan pengendalian tidak terlaksana dan terdokumentasi dengan baik			

	4. Potensi komunikasi dan informasi terkait pengendalian internal tidak berjalan secara efektif 5. Potensi kegiatan pemantauan tidak berjalan secara efektif 6. Potensi penurunan nilai level maturitas SPIP 7. Potensi pelaksanaan penilaian mandiri tidak dengan aturan terbaru
Mitigasi Risiko	1. Penertiban administrasi dengan menggunakan sistem terintegrasi 2. Mengikuti pelatihan/ diklat terkait teknik komunikasi 3. Bimtek PM Maturitas SPIP

Tabel Realisasi

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
3	3,178	3	3,188	4	3,999	4	-	4	-

Perspektif	*Customer Perspective*			
Sasaran Strategis	SS.3 Terwujudnya birokrasi BKN yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima			
Deskripsi Sasaran Strategis	Definisi: Terwujudnya birokrasi BKN yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima menggambarkan birokrasi BKN yang mampu bekerja dengan kelembagaan yang tertata, sistematis dan mampu melakukan efisiensi terutama pada aspek penganggaran. Pada akhirnya, kelembagaan yang berkualitas tersebut memacu peningkatan pelayanan.			
Indikator Kinerja Utama	**IKU.6 Nilai Pelaksanaan Sistem Merit**			
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Definisi			
	Indeks Pelaksanaan Sistem Merit BKN adalah nilai kuantitatif yang menunjukkan tingkat penerapan Sistem Merit di lingkungan BKN yang disebutkan di dalam UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang PNS, mulai dari Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi, Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, Perlindungan dan Pelayanan serta Sistem Informasi.			
	Formula			
	Penilaian Sistem Merit dilakukan oleh KASN sesuai dengan Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 40 Tahun 2108 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN dan Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan kategori: Kategori I (100-174) = Buruk Kategori II (175-249) = Kurang Kategori III (250-324) = Baik Kategori IV (325-400) = Sangat Baik			
Tujuan	Mewujudkan ASN BKN yang berkualitas yakni ASN BKN yang berkompeten, netral, berintegritas dan berkinerja tinggi			
Satuan Pengukuran	Nilai (kategori)			
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/ Output	(X) Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah

Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading
Metode Cascading	(X) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Buat baru
Unit Penanggung Jawab IKU	Biro Sumber Daya Manusia			
Sumber Data	Hasil Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit oleh KASN			
Jenis Perhitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	() Hasil perhitungan raw data		(X) Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maksimize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
Risiko	Menurunnya nilai Sistem Merit yang diperoleh BKN			
Mitigasi Risiko	Perbaikan pada komponen pelaksanaan Sistem Merit di BKN			

Tabel Realisasi

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
350	332,5	350	332,5	360	339	370	-	380	-

Perspektif	*Customer Perspective*
Sasaran Strategis	SS.3 Terwujudnya birokrasi BKN yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
Deskripsi Sasaran Strategis	Definisi: Terwujudnya birokrasi BKN yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima menggambarkan birokrasi BKN yang mampu bekerja dengan kelembagaan yang tertata, sistematis dan mampu melakukan efisiensi terutama pada aspek penganggaran. Pada akhirnya, kelembagaan yang berkualitas tersebut memacu peningkatan pelayanan.
Indikator Kinerja Utama	**IKU.7 Indeks Pengelolaan Aset**
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Definisi
	Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kualitas Pengelolaan Aset diukur dengan Indeks Pengelolaan Aset dari Kementerian Keuangan.
	Formula
	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/KM.6/2022 Tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2022, Indeks Pengelolaan Aset (IPA) terdiri dari 4 Sasaran Strategis (SS) sebagai berikut: **A. Sasaran Strategis I Pengelolaan Kekayaan Negara yang akuntabel dan produktif** 1. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPP terkait BMN pada K/L (5%); 2. Realisasi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari Pengelolaan Aset (15%); **B. Sasaran Strategis II Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan** 1. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) (10%); 2. Asuransi BMN (15%); **C. Sasaran Strategis III Pengawasan Pengendalian yang Efektif** 1. Tindak Lanjut Pengelolaan BMN (15%); 2. Persentase penyelesaian temuan BPK terkait BMN (15%); **D. Sasaran Strategis IV Administrasi BMN yang Handal** 1. Persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan (15%); 2. Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK) (10%).

Tujuan	Mengukur kualitas dari pengelolaan aset			
Satuan Pengukuran	Indeks			
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/ Output	(X) Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading
Metode Cascading	(X) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Buat baru
Unit Penanggung Jawab IKU	Biro Umum			
Sumber Data	Laporan Hasil Indeks Pengelolaan Aset yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan			
Jenis Perhitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	() Hasil perhitungan raw data		(X) Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maksimize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
Risiko	1. Kesalahan pencatatan pada saat pendetailan barang di aplikasi SAKTI; 2. Gagal lelang; 3. Pemanfaatan BMN yang tidak sesuai; 4. Kurang optimalnya pembinaan pengelolaan BMN; 5. Temuan BPK; 6. Perencanaan BMN yang tidak terealisasi; 7. Rekomendasi atas temuan BPK yang belum ditindaklanjuti; 8. BMN hilang; 9. Unit kerja yang terlambat menyampaikan laporan wasdal BMN; 10. BMN yang dikuasai oleh pihak lain; 11. Unit kerja yang terlambat mengajukan PSP; 12. Kesalahan dalam pendistribusian barang yang tidak sesuai dengan permintaan unit kerja; 13. Masih terdapat barang usang yang belum tercatat untuk dilakukan pemusnahan;			

	14. Kurang tertib administrasi unit kerja selaku pengelola barang persediaan; 15. Kurang tertib administrasi dalam pelaporan kerusakan BMN; 16. Terdapat pekerjaan pemeliharaan yang belum terselesaikan.
Mitigasi Risiko	1. Melakukan pengecekan berulang; 2. *Blacklist* pemenang lelang yang wanprestasi; 3. Menyusun telaahan penyelesaian permasalahan; 4. Sosialisasi pencatatan BMN; 5. Menganjurkan pengelola barang persediaan unit kerja agar mencatat setiap transaksi pada aplikasi SI-ONI secara rutin; 6. Meningkatkan koordinasi dengan pembina; 7. Perlu dibentuk tim untuk melakukan pengawasan pada saat pelaksanaan pekerjaan; 8. Membuat berita acara serah terima kepada pengguna; 9. Merencanakan laporan sesuai dengan jadwal yang ada; 10. Menyusun telaahan penyelesaian permasalahan; 11. Melakukan koordinasi secara berkala terkait peraturan penatausahaan BMN; 12. Melakukan pengecekan secara cermat sebelum barang keluar antara dua petugas (petugas distribusi dan petugas dari unit); 13. Melakukan pembinaan terhadap pengelola barang persediaan di unit kerja terkait penanganan barang usang; 14. Menyampaikan daftar unit kerja yang belum tertib administrasi kepada pimpinan untuk meminta arahan maupun tindak lanjut; 15. Menyusun laporan inventarisasi ARTK/material secara berkala dan menyusun jadwal prioritas penanganan kerusakan berdasarkan laporan unit kerja; 16. Menyusun perencanaan dengan melibatkan tenaga ahli/profesional, melaksanakan monitoring dan evaluasi dari pekerjaan yang dikerjakan, dan melaksanakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi;

Tabel Realisasi

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
N/A	N/A	N/A	3.01	N/A	3.14	3.2	-	4.04	-

Perspektif	*Customer Perspective*			
Sasaran Strategis	SS.3 Terwujudnya birokrasi BKN yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima			
Deskripsi Sasaran Strategis	Terwujudnya birokrasi BKN yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima menggambarkan birokrasi BKN yang mampu bekerja dengan kelembagaan yang tertata, sistematis dan mampu melakukan efisiensi terutama pada aspek penganggaran. Pada akhirnya, kelembagaan yang berkualitas tersebut memacu peningkatan pelayanan.			
Indikator Kinerja Utama	**IKU.8 Indeks Tata Kelola PBJ**			
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Definisi			
	Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, diukur dengan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP			
	Formula			
	Indeks tata kelola PBJ terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan, yaitu sebagai berikut: 1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari: a. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan); b. E-*Tendering* (Tender/Seleksi/Tender Cepat); c. E-*Purchasing*; d. Non-E-Tendering & Non-E-Purchasing; dan e. E-Kontrak. 2. Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ) 3. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)			
Tujuan	Mengukur kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa			
Satuan Pengukuran	Indeks			
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/ Output	(X) Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah

Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading
Metode Cascading	(X) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Buat baru
Unit Penanggung Jawab IKU	Biro Umum			
Sumber Data	Laporan Hasil Penilaian ITKP dari LKPP			
Jenis Perhitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	() Hasil perhitungan raw data		(X) Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maksimize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
Risiko	1. Tingkat kepatuhan sebagian pelaku pengadaan barang/jasa masih rendah; 2. Pengelolaan sistem PBJ tidak terlaksana dengan baik dikarenakan terjadinya gangguan sistem.			
Mitigasi Risiko	1. Surat edaran dari kepala Biro Umum dan monitoring *real time* yang di share sebelum *deadline* di WA grup; 2. Melakukan update sistem/built dengan memperhatikan waktu proses pemilihan penyedia.			

Tabel Realisasi

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
N/A	N/A	N/A	68.11	N/A	80.6	80.6	-	80.6	-

Perspektif	*Customer Perspective*
Sasaran Strategis	SS.3 Terwujudnya birokrasi BKN yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
Deskripsi Sasaran Strategis	Terwujudnya birokrasi BKN yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima menggambarkan birokrasi BKN yang mampu bekerja dengan kelembagaan yang tertata, sistematis dan mampu melakukan efisiensi terutama pada aspek penganggaran. Pada akhirnya, kelembagaan yang berkualitas tersebut memacu peningkatan pelayanan.
Indikator Kinerja Utama	**IKU.9 Nilai Hasil Audit Kearsipan dari ANRI**
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Definisi
	Nilai yang dihasilkan dari pelaksanaan audit kearsipan di lingkungan BKN yang mana audit tersebut dilakukan oleh tim audit eksternal yaitu lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
	Formula
	● Nilai Hasil Audit Kearsipan dari ANRI berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Adapun nilai hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal dan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal. ● Nilai hasil pengawasan kearsipan berlaku ketentuan sebagai berikut: ○ nilai pengawasan kearsipan eksternal memiliki bobot 60% (enam puluh persen) ○ nilai pengawasan kearsipan internal memiliki bobot 40% (empat puluh persen) ● Nilai hasil pengawasan kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Objek Pengawasan ● Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh Objek Pengawasan terdiri atas: ○ nilai > 90-100 dengan kategori AA (sangat memuaskan) ○ nilai > 80-90 dengan kategori A (memuaskan) ○ nilai >70-80 dengan kategori BB (sangat baik) ○ nilai >60-70 dengan kategori B (baik) ○ nilai >50-60 dengan kategori CC (cukup) ○ nilai >30-50 dengan kategori C (kurang) ○ nilai 0-30 dengan kategori D (sangat kurang)

Tujuan	Penilaian atas kepatuhan BKN dalam pengelolaan arsip terhadap kebijakan kearsipan			
Satuan Pengukuran	Nilai (Angka)			
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/ Output	(X) Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading
Metode Cascading	(X) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Buat baru
Unit Penanggung Jawab IKU	Biro Umum			
Sumber Data	Laporan Audit Kearsipan ANRI			
Jenis Perhitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	() Hasil perhitungan raw data		(X) Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maksimize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
Risiko	1. Pengelolaan Kearsipan Dinamis di lingkungan Kantor Pusat, Kantor Regional, Pusat Kepegawaian ASN dan UPT BKN tidak terlaksana dengan baik; 2. Pengawasan Kearsipan Internal yang tidak terlaksana dengan baik akan menghasilkan Capaian Indeks Kearsipan yang rendah dan mempengaruhi capaian Nilai Reformasi Birokrasi BKN; 3. Pengawasan Kearsipan di Kantor Regional yang tidak terlaksana dengan baik akan menghasilkan Capaian Indeks Kearsipan yang rendah dan mempengaruhi capaian Nilai Reformasi Birokrasi BKN; 4. Pengawasan Kearsipan Eksternal di Unit Kearsipan I BKN oleh ANRI; 5. Kegiatan pelayanan pengiriman surat ke instansi lain melalui kurir mengalami keterlambatan; 6. Kegiatan pelayanan penomoran surat yang tidak terlaksana dengan baik akan menurunkan capaian kinerja Layanan Biro Umum ;			

	7. Kegiatan pelayanan pengiriman surat ke instansi lain melalui jasa POS mengalami keterlambatan, akan menurunkan kinerja Layanan Biro Umum ; 8. Kegiatan pelayanan penerimaan surat masuk yang tidak sesuai tujuan tupoksi Instansi (Perseorangan) akan menurunkan capaian kinerja Layanan Biro Umum.
Mitigasi Risiko	1. Koordinasi antara pengelola kearsipan dengan pimpinan; 2. Sosialisasi pengawasan melalui rakor; 3. Sosialisasi pengawasan melalui rakor; 4. Sosialisasi pengawasan melalui rakor; 5. Kooordinasi antara kurir dengan Unit pengguna kurir; 6. Koordinasi dengan Unit pengolah surat; 7. Koordinasi dengan Unit pengolah surat; 8. Pemberian edukasi tupoksi Unit Kerja kepada setiap pegawai.

Tabel Realisasi

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
70	61.2	70	60.4	80	72.3	75	-	75	-

Perspektif	*Customer Perspective*			
Sasaran Strategis	SS.4 Terkelolanya anggaran secara efisien dan akuntabel			
Deskripsi Sasaran Strategis	Terkelolanya anggaran secara efisien dan akuntabel bermakna pengelolaan anggaran di BKN dilakukan dengan prinsip-prinsip penganggaran yang baik sesuai dengan aturan yang ada di Kementerian Keuangan			
Indikator Kinerja Utama	**IKU.10 Opini atas Laporan Keuangan BKN**			
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Definisi			
	Opini Atas Laporan Keuangan BKN merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern			
	Formula			
	Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah : 1. Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*) 2. Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*) 3. Tidak Wajar (*Adversed Opinion*) 4. Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*)			
Tujuan	Pencapaian prestasi terhadap kualitas Laporan Keuangan BKN			
Satuan Pengukuran	Predikat			
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/ Output	(X) Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	() Outcome		(X) Outcome Antara	() Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading

Metode Cascading	(X) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Buat baru
Unit Penanggung Jawab IKU	Biro Keuangan			
Sumber Data	Laporan Audit BPK			
Jenis Perhitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	() Hasil perhitungan raw data		(X) Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	() Maksimize		() Minimize	(X) Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
Risiko	Jika tidak diukur, terjadi penyampaian laporan keuangan yang tidak akuntabel			
Mitigasi Risiko	Penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketepatan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan			

Tabel Realisasi

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	WTP	-

Perspektif	*Customer Perspective*			
Sasaran Strategis	SS.4 Terkelolanya anggaran secara efisien dan akuntabel			
Deskripsi Sasaran Strategis	Terkelolanya anggaran secara efisien dan akuntabel bermakna pengelolaan anggaran di BKN dilakukan dengan prinsip-prinsip penganggaran yang baik sesuai dengan aturan yang ada di Kementerian Keuangan			
Indikator Kinerja Utama	**IKU.11 Nilai Predikat Indikator Kinerja Pelaksanaan APBN (IKPA)**			
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Definisi			
	Nilai Kementerian Keuangan terhadap 8 Indikator yang ditetapkan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.			
	Formula			
	Sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. $Nilai\ IKPA = \sum_{n=1}^{8} (Nilai\ Indikator_n\ x\ Bobot\ Indikator_n) : Konversi\ Bobot\ *)$ Pengukuran IKPA meliputi aspek: a. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran • Revisi DIPA • Deviasi Halaman III DIPA b. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran • Penyerapan Anggaran • Belanja Kontraktual • Penyelesaian Tagihan • Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan • Dispensasi Surat Perintah Membayar c. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran • Capaian Output			
Tujuan	Sebagai sarana evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran BKN			
Satuan Pengukuran	Nilai			
Jenis Aspek Target	() Kuantitas / Output	(X) Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading

Metode Cascading	() Adopsi langsung	() Dipersempit	(X) Komponen Pembentuk	() Buat baru
Unit Penanggung Jawab IKU	Biro Keuangan dan Biro Perencanan dan Organisasi			

Sumber Data	Nilai IKPA dari Kementerian Keuangan			
Jenis Perhitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	() Hasil perhitungan raw data		(X) Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maksimize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan
Risiko	Jika tidak melaksanakan 8 indikator IKPA, dilakukan skorsing oleh Kementerian Keuangan dalam pengelolaan keuangan dan anggaran			
Mitigasi Risiko	Monitoring pelaksanaan 8 indikator IKPA			

Tabel Realisasi

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
80	91,51	82	89,94	84	92,65	93	-	93	-

Perspektif	*Customer Perspective*			
Sasaran Strategis	SS.5 Terwujudnya hubungan masyarakat yang efektif			
Deskripsi Sasaran Strategis	Definisi: Terwujudnya Hubungan Masyarakat yang efektif adalah sesuatu yang terdiri dari semua bentuk komunikasi berencana baik kedalam maupun keluar yang bertujuan untuk mendapatkan citra positif dan dukungan dari Publik yang menjadi *Stakeholder* Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama			
Indikator Kinerja Utama	**IKU.12 Persentase Capaian Rerata Jangkauan Publikasi Per Media BKN**			
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Definisi			
	Perbandingan antara *reach* triwulan saat ini dengan *reach* triwulan sebelumnya dikali 100%. Pengelolaan dilakukan dengan melakukan jumlah perhitungan jumlah informasi yang diseminasikan, rerata jangkauan dan keterikatan yang dapat langsung terlihat melalui *analytic* masing-masing media yang dikelola.			
	Formula			
	$\text{Rerata Reach} = \frac{\text{Reach Triwulan saat ini}}{\text{Reach Triwulan sebelumnya}} \times 100\%$			
Tujuan	Untuk mengetahui jangkauan publikasi per media BKN			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(X) Kuantitas/ Output	() Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading
Metode Cascading	(X) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Buat baru
Unit Penanggung Jawab IKU	Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama			

Sumber Data	Hasil Perhitungan Media Monitoring			
Jenis Perhitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(X) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maksimize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan
Risiko	Minimnya jangkauan publikasi per media BKN			
Mitigasi Risiko	Penyediaan aplikasi media monitoring untuk mempermudah perhitungan pemberitaan yang baik tentang BKN di media massa			

Tabel Realisasi

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	94%	-	94%	-

Perspektif	*Customer Perspective*			
Sasaran Strategis	SS.5 Terwujudnya hubungan masyarakat yang efektif			
Deskripsi Sasaran Strategis	Definisi: Terwujudnya Hubungan Masyarakat yang efektif adalah sesuatu yang terdiri dari semua bentuk komunikasi berencana baik kedalam maupun keluar yang bertujuan untuk mendapatkan citra positif dan dukungan dari Publik yang menjadi Stakeholder Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama.			
Indikator Kinerja Utama	**IKU.13 Nilai Keterbukaan Informasi Publik**			
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Definisi			
	Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Lingkup Settama BKN menggambarkan nilai Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan Komunikasi dengan Media dan Lembaga yang Optimal di Lingkup BKN			
	Formula			
	Nilai diperoleh dari hasil pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik oleh Komisi Informasi Pusat dengan formula perhitungan sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Adapun nilai keterbukaan informasi publik dan pelayanan komunikasi dengan media dan lembaga yang optimal di BKN sesuai dengan kriteria: a. informatif dengan nilai 97-100; b. menuju informatif dengan nilai 80-96; c. cukup informatif dengan nilai 60-79; d. kurang informatif dengan nilai 40-59; e. tidak informatif dengan nilai <39.			
Tujuan	Mengukur sejauh mana BKN telah melaksanakan pengelolaan Informasi Publik dan Pelayanan Komunikasi dengan Media dan Lembaga yang Optimal			
Satuan Pengukuran	Nilai (kategori)			
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/ Output	(X) Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya

Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading
Metode Cascading	(X) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Buat baru
Unit Penanggung Jawab IKU	Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama			
Sumber Data	Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Pusat			
Jenis Perhitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	() Hasil perhitungan raw data		(X) Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maksimize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
Risiko	Minimnya *supply* informasi dari Unit Kerja			
Mitigasi Risiko	1. Penyelenggaraan Bimtek bagi pengelola PPID unit di lingkungan BKN 2. Penyediaan ruang PPID yang terstandar 3. Pengembangan website PPID dengan supervisi dari KIP 4. Peningkatan kompetensi dengan Bimtek atau benchmarking ke instansi yang memiliki pengelolaan PPID lebih baik			

Tabel Realisasi

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Cukup Informatif	Cukup Informatif (69,12)	Menuju Informatif (80)	Cukup Informatif (73,16)	Menuju Informatif (81)	Informatif (90,93)	Informatif (91)	-	Informatif (91)	-

Perspektif	*Customer Perspective*			
Sasaran Strategis	SS.6 Terwujudnya pelayanan kesekretariatan yang prima bagi mitra Sekretaris Utama			
Deskripsi Sasaran Strategis	Definisi: Terwujudnya pelayanan Kesekretariatan yang prima bagi mitra Sekretaris Utama bermakna bahwa kesekretariatan utama menyelenggarakan pelayanan yang prima kepada unit kerja di lingkungan BKN. Upaya penyelenggaraan layanan tersebut terus diperbaiki untuk meningkatkan kualitas layanan			
Indikator Kinerja Utama	**IKU.14 Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretaris Utama**			
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Definisi			
	Indeks yang diukur seuai dengan Permen PAN & RB nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dari Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerjasama, Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Umum dan Biro Sumber Daya Manusia.			
	Formula			
	Perhitungan nilai indeks mengacu pada pengumpulan nilai indeks dari semua unit kerja yang ada di lingkup Sekretariat Utama $N = \frac{A+B+C+D+E}{5}$ N = Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Utama A = Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Biro Umum B = Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Biro Keuangan C = Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Biro Sumber Daya Manusia D = Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Biro BHHK E = Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Biro Perencanaan dan Organisasi dan Organisasi			
Tujuan	Untuk mengetahui dan meningkatkan kualitas layanan di Sekretariat Utama			
Satuan Pengukuran	Indeks			
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/ Output	(X) Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah

Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung	() Dipersempit	(X) Komponen Pembentuk	() Buat baru
Unit Penanggung Jawab IKU	Biro Umum, Biro Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, Biro Perencanaan dan Organisasi			
Sumber Data	Laporan rekapitulasi Survei Kepuasan di lingkungan Sekretariat Utama			
Jenis Perhitungan Data	() Nilai Posisi Akhir		(X) Rata-rata	
Status Data	(X) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maksimize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	(X) Semesteran	() Tahunan
Risiko	Tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama			
Mitigasi Risiko	1. Pembuatan *hotline center* untuk pelayanan; 2. Standar pelayanan yang mengacu pada kondisi ideal sesuai maklumat pelayanan yang ada dilingkungan BKN.			

Tabel Realisasi

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
85	81,49	86	84,01	87	85,67	88	-	95	-

Perspektif	*Internal Process Perspective*			
Sasaran Strategis	SS.7 Terlaksananya penempatan SDM BKN sesuai dengan kompetensi			
Deskripsi Sasaran Strategis	Definisi: Suatu upaya untuk menempatkan SDM di BKN sesuai dengan kompetensinya, melakukan seleksi, mutasi dan promosi pegawai secara adil dan kompetitif berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara BKN yang kompeten, profesional dan berintegritas.			
Indikator Kinerja Utama	**IKU.15 Persentase Penempatan Pegawai sesuai dengan Kompetensinya**			
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Definisi			
	Ukuran yang memperlihatkan penempatan jumlah pegawai dibandingkan dengan syarat jabatan yang sesuai dengan kompetensi jabatan. Semakin tinggi persentasenya, maka semakin baik BKN dalam mengimplementasikan penempatan SDM sesuai dengan kompetensinya. Dalam mengukur capaian IKU presentase penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya digunakan data yang diperoleh dari Sistem Manajemen Talenta BKN. Biro SDM menyusun *milestone* untuk kluster pegawai yang diidentifikasi sebagai berikut: Tahun 2022 : JFT Madya dan Administrator; Tahun 2023 : JFT Muda dan Pengawas; Tahun 2024 : JPT Madya, JPT Pratama, JPT Utama JFT Pertama, JF Keterampilan & JF Pelaksana.			
	Formula			
	Dalam penempatan SDM sesuai dengan kompetensi setiap pegawai dijabarkan ke dalam tujuh rumpun jabatan lalu setiap rumpun jabatan diperingkat bersadarkan kesesuaian rekam jejak dan pelatihan. Urutan penempatan sesuai dengan nilai rumpun jabatan yang terbanyak diambil tiga peringkat rumpun tertinggi untuk rencana penempatan. Rangking Rumpun Jabatan 1 = Rekam Jejak + Pelatihan Rangking Rumpun Jabatan 2 = Rekam Jejak + Pelatihan Rangking Rumpun Jabatan 3 = Rekam Jejak + Pelatihan Rangking Rumpun Jabatan 4 = Rekam Jejak + Pelatihan Rangking Rumpun Jabatan 5 = Rekam Jejak + Pelatihan Rangking Rumpun Jabatan 6 = Rekam Jejak + Pelatihan Rangking Rumpun Jabatan 7 = Rekam Jejak + Pelatihan			
Tujuan	Untuk memperlihatkan ukuran penempatan SDM sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	( ) Kuantitas/ Output	(X) Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah

Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading
Metode Cascading	(X) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Buat baru
Unit Penanggung Jawab IKU	Biro Sumber Daya Manusia			
Sumber Data	Aplikasi Manajemen Talenta (MATA ASN)			
Jenis Perhitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(X) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maksimize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
Risiko	Persentase Penempatan Pegawai Sesuai dengan Kompetensinya kurang optimal			
Mitigasi Risiko	1. Melaksanakan diklat pengembangan kompetensi untuk pegawai; 2. Melakukan sidang baperjakat untuk menentukan penempatan pegawai.			

Tabel Realisasi

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
90%	80%	91%	91%	92%	93,65%	93%	-	95%	-

Perspektif	*Internal Process Perspective*			
Sasaran Strategis	SS.8 Terselenggaranya RB BKN sesuai roadmap RB BKN			
Deskripsi Sasaran Strategis	Sasaran terselenggaranya RB BKN sesuai roadmap RB BKN menggambarkan kesesuaian implementasi RB dengan rencana berupa road map yang sudah ditetapkan setiap lima tahun sekali			
Indikator Kinerja Utama	**IKU.16 Persentase Program dan Kegiatan RB BKN yang dilaksanakan dibanding jumlah program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai roadmap RB per tahun**			
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Definisi			
	Persentase yang mendeskripsikan ketersesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan rencana aksi yang telah diprogramkan oleh Tim Reformasi Birokrasi melalui metode analisis perbandingan.			
	Formula			
	Membandingkan Rencana Aksi RB BKN yang sudah disusun dengan yang sudah terlaksana X/Y x 100 % X : rencana aksi yang diimplementasikan Y : jumlah seluruh rencana aksi			
Tujuan	Sebagai indikator untuk memonitor ketercapaian rencana aksi program Reformasi Birokrasi di Badan Kepegawaian Negara untuk melakukan perubahan di area perubahan RB			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(X) Kuantitas/ Output	() Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading

Metode Cascading	(X) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Buat baru
Unit Penanggung Jawab IKU	Biro Perencanaan dan Organisasi			
Sumber Data	Laporan Pelaksanaan RB yang disampaikan oleh Sekretariat RB BKN			
Jenis Perhitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(X) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maksimize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
Risiko	Tidak terlaksananya kegiatan reformasi birokrasi sesuai kegiatan yang harus dilaksanakan dalam Roadmap RB BKN			
Mitigasi Risiko	1. Penandatangan perjanjian kinerja *reform*/inovasi oleh setiap unit/satuan kerja; 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan berkelanjutan melalui PIC yang telah dibentuk;			

Tabel Realisasi

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	-

Perspektif	*Internal Process Perspective*			
Sasaran Strategis	SS.9 Terwujudnya Laporan Keuangan yang Akuntabel			
Deskripsi Sasaran Strategis	Sasaran terwujudnya laporan keuangan yang akuntabel, transparan dan tepat waktu menggambarkan laporan keuangan di BKN harus dilaporkan secara akuntabel yaitu dapat dipertanggungjawabkan baik secara anggaran maupun nilai fisiknya, transparan yaitu dipublikasikan kepada publik, dan tepat waktu yaitu sesuai waktu yang sudah ditentukan oleh Kementerian Keuangan.			
Indikator Kinerja Utama	**IKU.17 Persentase Kualitas Laporan Keuangan BA 088**			
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Definisi			
	Indikator ini merupakan indikator yang memperlihatkan bahwa laporan keuangan disampaikan sesuai dengan kaidah-kaidah Sistem Akuntansi Pemerintah.			
	Formula			
	Laporan Keuangan BKN disampaikan keseluruhan dan memenuhi kaidah Sistem Akuntansi Pemerintah, terdiri atas kewajiban penyelesaian rekonsilitasi eksternal bulanan pada *open period*, dan penyampaian laporan keuangan satuan kerja sesuai dengan PMK 222 tahun 2016 dan PMK 17 tahun 2019			
Tujuan	Untuk mengukur kualitas laporan keuangan BKN			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/ Output	(X) Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading
Metode Cascading	(X) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Buat baru
Unit Penanggung Jawab IKU	Biro Keuangan			
Sumber Data	Laporan Keuangan BKN Audited, *Unaudited*, Semester I, dan TW III			

Jenis Perhitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	() Hasil perhitungan raw data		(X) Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maksimize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan
Risiko	1. Pencatatan transaksi terhambat 2. Data yang tersaji dalam Laporan Keuangan diragukan kewajaran 3. Nilai/akun dalam Laporan Keuangan tidak akurat 4. Pengungkapan yang kurang memadai 5. Laporan Keuangan tidak disajikan tepat waktu			
Mitigasi Risiko	Penyampaian laporan keuangan yang tersusun sesuai kaidah-kaidah Sistem Akuntansi Pemerintah			

Tabel Realisasi

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
N/A	N/A	N/A	N/A	80	84.59	80	-	90	-

Perspektif	*Internal Process Perspective*			
Sasaran Strategis	SS.10 Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan kerjasama bidang manajemen ASN			
Deskripsi Sasaran Strategis	Terwujudnya kerjasama yang implementatif terhadap program dan kebijakan Manajemen ASN bermakna kerjasama yang dilakukan oleh BKN merupakan kerjasama yang implementatif terkait dengan program dan kebijakan manajemen ASN yang diemban oleh BKN			
Indikator Kinerja Utama	**IKU.18 Persentase Dokumen Kerjasama yang disepakati**			
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Definisi			
	Indikator ini menggambarkan jumlah dokumen yang menjadi target BKN terkait Kerjasama			
	Formula			
	IKU = (N/A) x 100% N = Jumlah Dokumen Kerja Sama yang Disepakati A = Jumlah Dokumen yang Ditindaklanjuti BHHK			
Tujuan	Untuk mengetahui efektivitas kerjasama yang dilakukan oleh BKN			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(X) Kuantitas/ Output	() Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading
Metode Cascading	(X) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Buat baru
Unit Penanggung Jawab IKU	Biro Humas, Hukum dan Kerjasama			
Sumber Data	Laporan Tindak Lanjut Kerjasama			

Jenis Perhitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir		(X) Rata-rata	
Status Data	(X) Hasil perhitungan raw data		(X) Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maksimize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan
Risiko	Persentase dokumen kerja sama yang berhasil disepakati			
Mitigasi Risiko	Penambahan jumlah anggaran perjalanan dinas luar negeri dalam rangka penyelenggaraan kerja sama (bilateral, AACSM, dll)			

Tabel Realisasi

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
92%	94%	92%	85%	92%	94,25%	95%	-	95%	-

Perspektif	*Internal Process Perspective*			
Sasaran Strategis	SS.11 Terselenggaranya publikasi dan pelayanan komunikasi dengan media dan lembaga yang optimal			
Deskripsi Sasaran Strategis	Terselenggaranya publikasi dan pelayanan komunikasi dengan media dan lembaga yang optimal adalah sesuatu yang terdiri dari semua bentuk komunikasi berencana baik kedalam maupun keluar yang bertujuan untuk mendapatkan citra positif dan dukungan dari Publik yang menjadi Stakeholder Biro HHK BKN			
Indikator Kinerja Utama	**IKU.19 Persentase Jumlah Publikasi Program dan Kegiatan BKN melalui Media dan Lembaga Stakeholder Lainnya**			
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Definisi			
	Indikator ini menggambarkan jumlah publikasi program dan kegiatan BKN yang dipublikasikan melalui media dan stakeholder lainnya (K/L)			
	Formula			
	IKU = (N/A) x 100% N = jumlah publikasi program kegiatan BKN melalui media dan Lembaga stakeholder lainnya A = jumlah publikasi program kegiatan BKN melalui media dan Lembaga stakeholder lainnya sesuai dengan rencana publikasi tahunan			
Tujuan	Untuk mengetahui efektivitas publikasi dan pelayanan komunikasi dengan media dan lembaga yang optimal yang dilakukan oleh BKN			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(X) Kuantitas/ Output	() Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading
Metode Cascading	(X) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Buat baru

Unit Penanggung Jawab IKU	Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama			
Sumber Data	Laporan Tindak Lanjut Hubungan Media dan Publikasi			
Jenis Perhitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(X) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maksimize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan
Risiko	Minimnya publikasi program dan kegiatan BKN melalui media dan lembaga stakeholder lainnya			
Mitigasi Risiko	1. Peningkatan koordinasi antar unit di lingkungan BKN terkait program/kegiatan yang akan dipublikasikan; 2. Tersedianya strategi komunikasi sehingga terdapat parameter keberhasilan publikasi.			

Tabel Realisasi

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
95%	98,2%	95%	95%	98,3%	96%	98,3%	-	98,3%	-

Perspektif	*Learn and Growth Perspective*			
Sasaran Strategis	SS.12 Terwujudnya ASN di lingkup Settama BKN yang kompeten			
Deskripsi Sasaran Strategis	Terwujudnya ASN di lingkup Settama BKN yang kompeten bermakna bahwa ASN Settama BKN yang diharapkan memiliki kompetensi tinggi, professional dalam bekerja serta juga memiliki integritas dalam menjalankan tugasnya			
Indikator Kinerja Utama	**IKU.20 Indeks Profesionalitas ASN Settama BKN**			
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Definisi			
	Suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN BKN di lingkungan Settama yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalitas ASN. Pengukuran dan penilaian Indeks Profesional ASN dilaksanakan dengan mengukur 4 (empat) dimensi, yang meliputi dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin. Masing-masing dimensi memiliki bobot penilaian, yakni Kualifikasi dengan porsi 25%, Kompetensi 40%, Kinerja 30% dan Disiplin yang memiliki bobot 5%.			
	Formula			
	$IP\ ASN\ Sestama = \frac{IP\ ASN\ Unit\ Eselon\ II\ di\ lingkungan\ Sekretariat\ Utama}{Jumlah\ Unit\ Eselon\ II\ di\ lingkungan\ Sekretaris\ Utama \times 100\%}$			
Tujuan	Untuk digunakan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat Profesionalitas sebagai Pegawai BKN di lingkungan Sekretariat Utama dan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai BKN secara organisasional			
Satuan Pengukuran	Indeks			
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/ Output	(X) Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading

Metode Cascading	() Adopsi langsung	(X) Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Buat baru
Unit Penanggung Jawab IKU	Biro Sumber Daya Manusia, Biro Keuangan, Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Humas Hukum dan Kerjasama, Biro Umum			
Sumber Data	Laporan Hasil Pengukuran Indeks Profesional ASN di BKN (Berdasarkan hasil perhitungan mandiri Indeks Profesional dan data dari aplikasi IP-JASN)			
Jenis Perhitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	() Hasil perhitungan raw data		(X) Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maksimize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
Risiko	Masih terdapat pegawai di lingkup Sekretariat Utama yang belum melaksanakan syarat pengembangan kompetensi 20 JP dalam 1 tahun			
Mitigasi Risiko	Peningkatan kompetensi dan kinerja di lingkungan Sekretariat Utama, melalui implementasi CMB internal di lingkungan Sekretariat Utama.			

Tabel Realisasi

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
80	67,77	80	77,85	81	76,13	81	-	82	-

Perspektif	*Learn and Growth Perspective*
Sasaran Strategis	SS.13 Tersedianya Sistem Informasi ASN di lingkup Settama BKN yang handal dan mudah diakses
Deskripsi Sasaran Strategis	Tersedianya Sistem Informasi ASN di lingkup Sekretariat Utama sebagai komitmen mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronis, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Indikator Kinerja Utama	**IKU.21 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar di Lingkup Settama**
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Definisi
	Ukuran yang menggambarkan pemanfaatan sistem informasi terstandar yang disediakan oleh BKN untuk pengelolaan internal di Sekretariat Utama. Aplikasi yang digunakan di lingkup Settama: 1. SAKTI, 2. SMART, 3. E-Monev, 4. KRISNA, 5. SPEKTRA, 6. E-Travel, 7. Sipepi, 8. Honor, 9. EDMS, 10. LBP 11. Presensi, 12. Kinerja, 13. Simpeg, 14. Aplikasi CMB, 15. DS, 16. Email BKN, 17. Loker BKN, 18. Srikandi, 19. Sioni, 20. Simonbaja, 21. GIS (*Goods Inventory System*), 22. Om Span, 23. SIAVA, 24. SIKAP, 25. E-Verif
	Formula
	Perhitungan mengacu pada pemanfaatan sistem informasi di semua unit kerja yang ada di lingkup Sekretariat Utama $$Realisasi = \frac{\frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} + \frac{a_3}{b_3} + \cdots + \frac{a_{25}}{b_{25}}}{25} x100\%$$ Keterangan: a1 = Jumlah pegawai yang menggunakan aplikasi SAKTI berdasarkan hasil survei b1 = Jumlah pegawai yang seharusnya menggunakan aplikasi SAKTI a2 = Jumlah pegawai yang menggunakan aplikasi SMART berdasarkan hasil survei b2 = Jumlah pegawai yang seharusnya menggunakan aplikasi SMART a3 = Jumlah pegawai yang menggunakan aplikasi E-Monev berdasarkan hasil survei b3 = Jumlah pegawai yang seharusnya menggunakan aplikasi E-Monev a4 = Jumlah pegawai yang menggunakan aplikasi KRISNA berdasarkan hasil survei b4 = Jumlah pegawai yang seharusnya menggunakan aplikasi KRISNA a5 = Jumlah pegawai yang menggunakan aplikasi SPEKTRA berdasarkan hasil survei b5 = Jumlah pegawai yang seharusnya menggunakan aplikasi SPEKTRA a6 = Jumlah pegawai yang menggunakan aplikasi E-Travel berdasarkan hasil survei b6 = Jumlah pegawai yang seharusnya menggunakan aplikasi E-Travel a7 = Jumlah pegawai yang menggunakan aplikasi Sipepi berdasarkan hasil survei b7 = Jumlah pegawai yang seharusnya menggunakan aplikasi Sipepi a8 = Jumlah pegawai yang menggunakan aplikasi Honor berdasarkan hasil survei b8 = Jumlah pegawai yang seharusnya menggunakan aplikasi Honor a9 = Jumlah pegawai yang menggunakan aplikasi EDMS berdasarkan hasil survei b9 = Jumlah pegawai yang seharusnya menggunakan aplikasi EDMS a10 = Jumlah pegawai yang menggunakan aplikasi LBP berdasarkan hasil survei b10 = Jumlah pegawai yang seharusnya menggunakan aplikasi LBP

	a11 = Jumlah pegawai yang menggunakan aplikasi Presensi berdasarkan hasil survei b11 = Jumlah pegawai yang seharusnya menggunakan aplikasi Presensi a12 = Jumlah pegawai yang menggunakan aplikasi Kinerja berdasarkan hasil survei b12 = Jumlah pegawai yang seharusnya menggunakan aplikasi Kinerja a13 = Jumlah pegawai yang menggunakan aplikasi Simpeg berdasarkan hasil survei b13 = Jumlah pegawai yang seharusnya menggunakan aplikasi Simpeg a14 = Jumlah pegawai yang menggunakan aplikasi CMB berdasarkan hasil survei b14 = Jumlah pegawai yang seharusnya menggunakan aplikasi CMB a15 = Jumlah pegawai yang menggunakan aplikasi DS berdasarkan hasil survei b15 = Jumlah pegawai yang seharusnya menggunakan aplikasi DS a16 = Jumlah pegawai yang menggunakan aplikasi e-mail BKN berdasarkan hasil survei b16 = Jumlah pegawai yang seharusnya menggunakan aplikasi e-mail BKN a17 = Jumlah pegawai yang menggunakan aplikasi Loker BKN berdasarkan hasil survei b17 = Jumlah pegawai yang seharusnya menggunakan aplikasi Loker BKN a18 = Jumlah pegawai yang menggunakan aplikasi Srikandi berdasarkan hasil survei b18 = Jumlah pegawai yang seharusnya menggunakan aplikasi Srikandi a19 = Jumlah pegawai yang menggunakan aplikasi Sioni berdasarkan hasil survei b19 = Jumlah pegawai yang seharusnya menggunakan aplikasi Sioni a20 = Jumlah pegawai yang menggunakan aplikasi Simonbaja berdasarkan hasil survei b20 = Jumlah pegawai yang seharusnya menggunakan aplikasi Simonbaja a21 = Jumlah pegawai yang menggunakan aplikasi GIS berdasarkan hasil survei b21 = Jumlah pegawai yang seharusnya menggunakan aplikasi GIS a22 = Jumlah pegawai yang menggunakan aplikasi Om Span berdasarkan hasil survei b22 = Jumlah pegawai yang seharusnya menggunakan aplikasi Om Span a23 = Jumlah pegawai yang menggunakan aplikasi SIAVA berdasarkan hasil survei b23 = Jumlah pegawai yang seharusnya menggunakan aplikasi SIAVA a24 = Jumlah pegawai yang menggunakan aplikasi SIKAP berdasarkan hasil survei b24 = Jumlah pegawai yang seharusnya menggunakan aplikasi SIKAP a25 = Jumlah pegawai yang menggunakan aplikasi E-Verif berdasarkan hasil survei b25 = Jumlah pegawai yang seharusnya menggunakan aplikasi E-Verif			
Tujuan	Untuk mendorong pemanfaatan sistem informasi pengelolaan internal di Settama dalam rangka penunjang SPBE BKN			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(X) Kuantitas/ Output	() Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung	(X) Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Buat baru
Unit Penanggung Jawab IKU	Biro Umum, Biro Humas Hubungan dan Kerjasama, Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia			

Sumber Data	Laporan Pemanfaatan Sistem Informasi Sekretariat Utama	
Jenis Perhitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir	() Rata-rata

Status Data	(X) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maksimize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
Risiko	1. Aplikasi yang digunakan di Sekretariat Utama belum sepenuhnya terintegrasi dengan aplikasi layanan lainnya; *2.* Masih ada aplikasi yang belum menerapkan fitur komunikasi dua arah (*feedback).*			
Mitigasi Risiko	Koordinasi dengan unit pengelola Teknologi dan Sistem Informasi terkait Infrastruktur			

Tabel Realisasi									
2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
65%	100%	100%	95%	100%	100%	100%	N/A	100%	N/A

Perspektif	*Learn and Growth Perspective*			
Sasaran Strategis	SS.14 Terwujudnya birokrasi BKN di lingkup Settama yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima			
Deskripsi Sasaran Strategis	Terwujudnya birokrasi BKN di lingkup Settama yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima menggambarkan birokrasi Sekretariat Utama BKN yang mampu bekerja dengan kelembagaan yang tertata, sistematis dan mampu melakukan efisiensi terutama pada aspek penganggaran. Pada akhirnya, kelembagaan yang berkualitas tersebut memacu peningkatan pelayanan			
Indikator Kinerja Utama	**IKU.22 Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komponen Pengungkit di Lingkup Settama BKN**			
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Definisi			
	Indikator kinerja yang mengukur pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Sekretariat Utama BKN			
	Formula			
	Laporan Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Sekretariat Utama BKN (Berdasarkan hasil Perhitungan Mandiri Pelaksanaan RB Settama)			
Tujuan	Sebagai dasar dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkup Sekretariat Utama			
Satuan Pengukuran	Nilai			
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/ Output	(X) Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung	() Dipersempit	(X) Komponen Pembentuk	() Buat baru
Unit Penanggung Jawab IKU	Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Keuangan, Biro SDM, Biro Umum, Biro HHK			

Sumber Data	Hasil Penilaian Mandiri oleh Tim Penilai Instansi			
Jenis Perhitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	() Hasil perhitungan raw data		(X) Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maksimize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
Risiko	Tidak terlaksananya Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sestama BKN			
Mitigasi Risiko	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) Reformasi Birokrasi secara berkala dan berkelanjutan melalui PIC yang telah dibentuk;			

Tabel Realisasi

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
36	34.54	36	34.54	36	32.39	36	-	36	-

Perspektif	*Learn and Growth Perspective*
Sasaran Strategis	SS.14 Terwujudnya birokrasi BKN di lingkup Settama yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
Deskripsi Sasaran Strategis	Terwujudnya birokrasi BKN di lingkup Settama yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima menggambarkan birokrasi Sekretariat Utama BKN yang mampu bekerja dengan kelembagaan yang tertata, sistematis dan mampu melakukan efisiensi terutama pada aspek penganggaran. Pada akhirnya, kelembagaan yang berkualitas tersebut memacu peningkatan pelayanan
Indikator Kinerja Utama	**IKU.23 Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara**
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Definisi
	● Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) merupakan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). ● Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. ● SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja di BKN. ● • Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Sekretariat Utama BKN menggambarkan penilaian atas implementasi SAKIP di Sekretariat Utama BKN yang dilakukan oleh Inspektorat BKN dengan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
	Formula
	Hasil penilaian oleh Inspektorat BKN yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja oleh Inspektorat BKN
Tujuan	1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP di Sekretariat Utama BKN;

	2. Menilai tingkat implementasi SAKIP di Sekretariat Utama BKN; 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerj;a 4. Memperoleh saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP di Sekretariat Utama BKN; 5. Menyusun rencana tindak lanjut implementasi SAKIP atas hasil penilaian periode sebelumnya.			
Satuan Pengukuran	Nilai			
Jenis Aspek Target	() Kuantitas/ Output	(X) Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung	() Dipersempit	(X) Komponen Pembentuk	() Buat baru
Unit Penanggung Jawab IKU	Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Keuangan, Biro SDM, Biro Umum, Biro HHK			
Sumber Data	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang dikeluarkan oleh Inspektorat BKN			
Jenis Perhitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	() Hasil perhitungan raw data		(X) Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maksimize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
Risiko	1. Rekomendasi hasil evaluasi kinerja belum ditindaklanjuti dan dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan 2. Pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan			
Mitigasi Risiko	1. Fasilitasi dan pendampingan Tim Akuntabilitas Kinerja dalam monitoring dan evaluasi kinerja setiap triwulan 2. Pembuatan aplikasi manajemen kinerja organisasi			
Tabel Realisasi				

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
84	71.96	84	73.95	85	72.55	85	-	86	-

Perspektif	*Learn and Growth Perspective*			
Sasaran Strategis	SS.15 Terkelolanya anggaran di lingkup Settama BKN secara efisien dan akuntabel			
Deskripsi Sasaran Strategis	Terkelolanya anggaran secara efisien dan akuntabel bermakna pengelolaan anggaran di lingkungan Sekretariat Utama BKN dilakukan dengan prinsip-prinsip penganggaran yang baik sesuai dengan aturan yang ada di Kementerian Keuangan			
Indikator Kinerja Utama	**IKU.24 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkup Settama BKN**			
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Definisi			
	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkup Settama BKN memperlihatkan seberapa besar serapan baik anggaran maupun fisik yang ada di Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara. Semakin besar serapan tersebut maka akan semakin efektif perencanaan yang sudah disusun dengan implementasi penggunaan anggaran			
	Formula			
	$$PA = \frac{Ai}{An} \times 100\%$$ PA = Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ai = Jumlah serapan anggaran dan fisik An = Perencanaan anggaran dan fisik			
Tujuan	Untuk memperlihatkan efektivitas dalam melakukan penyerapan anggaran maupun fisik yang sudah direncanakan sebelumnya			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(X) Kuantitas/ Output	() Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading

Metode Cascading	() Adopsi langsung	(X) Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Buat baru
Unit Penanggung Jawab IKU	Biro Umum, Biro Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, Biro Perencanaan dan Organisasi			
Sumber Data	Laporan hasil penyerapan anggaran dan fisik keseluruhan unit di lingkungan Sekretariat Utama BKN			
Jenis Perhitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(X) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maksimize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan
Risiko	Jika tidak melakukan penghitungan, tidak diketahui efektivitas serapan anggaran dan fisik di lingkungan Sekretariat Utama BKN			
Mitigasi Risiko	Monitoring serapan anggaran dan fisik			

Tabel Realisasi

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
98%	98,86%	99%	90,58%	100%	97,68	100%	-	100%	-

Perspektif	*Learn and Growth Perspective*			
Sasaran Strategis	SS.15 Terkelolanya anggaran di lingkup Settama BKN secara efisien dan akuntabel			
Deskripsi Sasaran Strategis	Terkelolanya anggaran secara efisien dan akuntabel bermakna pengelolaan anggaran di lingkungan Sekretariat Utama BKN dilakukan dengan prinsip-prinsip penganggaran yang baik sesuai dengan aturan yang ada di Kementerian Keuangan			
Indikator Kinerja Utama	**IKU.25 Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat**			
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Definisi			
	Indikator ini memperlihatkan bahwa tindak lanjut atas temuan hasil audit Inspektorat/BPK terkait laporan keuangan yang ada di lingkungan Settama baik di Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, Biro Umum dan Biro Keuangan ditindaklanjuti oleh unit terkait			
	Formula			
	$Pt = \frac{Ti}{Tn} \times 100\%$ Pt = Persentase temuan yang ditindaklanjuti setiap Biro Ti = Jumlah temuan yang ditindaklanjuti Tn = Jumlah keseluruhan temuan			
Tujuan	Untuk memperlihatkan kepatuhan unit atas tindak lanjut atas rekomendasi BPK/Inspektorat			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(X) Kuantitas/ Output	() Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung	(X) Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Buat baru

Unit Penanggung Jawab IKU	Biro Umum, Biro Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, Hukum dan Kerjasama, Biro Perencanaan			
Sumber Data	Laporan Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan Oleh BPK/Inspektorat			
Jenis Perhitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(X) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maksimize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
Risiko	Jika tidak melakukan penghitungan, tidak diketahui kepatuhan unit terhadap rekomendasi temuan BPK/Inspektorat			
Mitigasi Risiko	Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan			

Tabel Realisasi

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	-

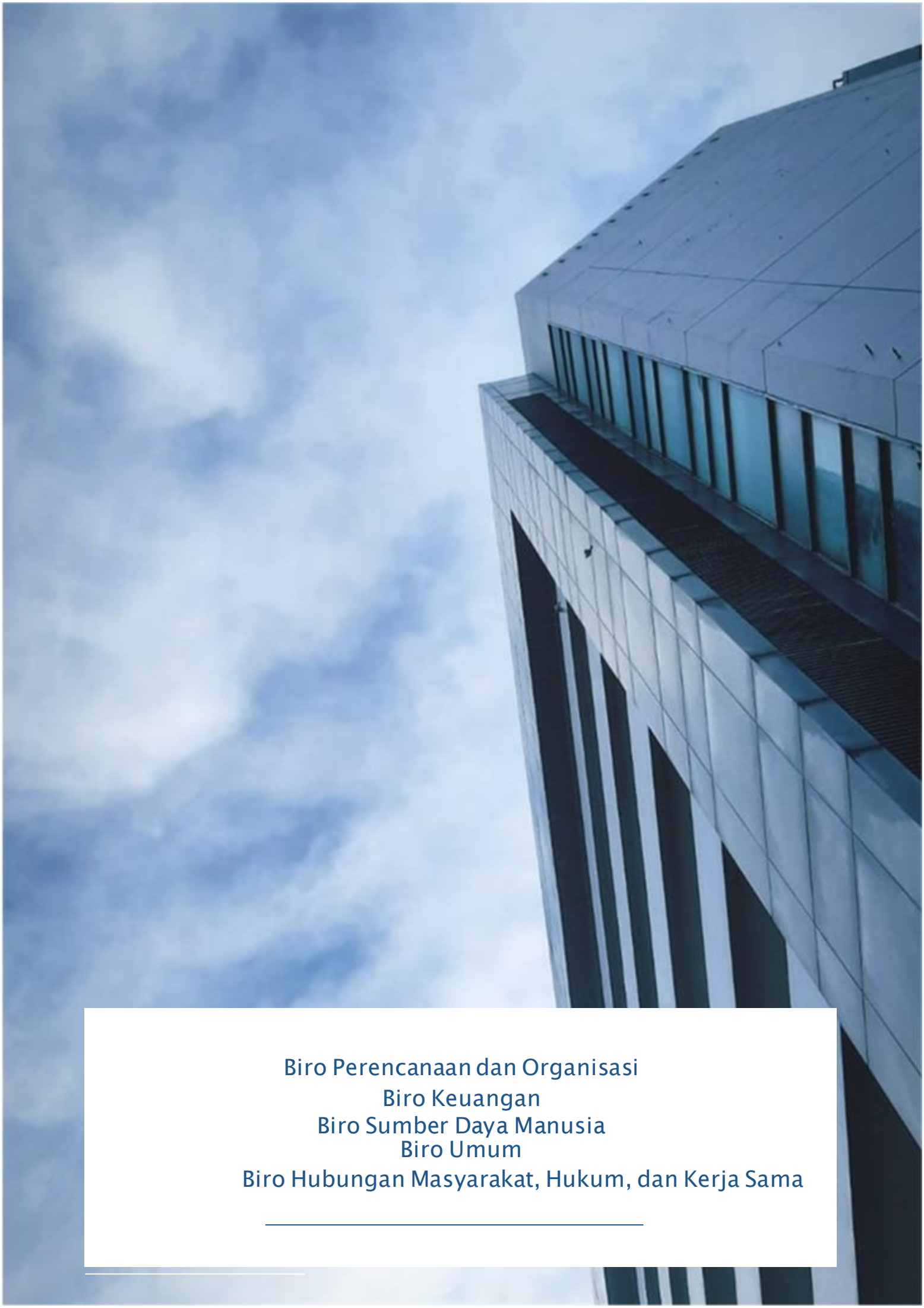

Biro Perencanaan dan Organisasi
Biro Keuangan
Biro Sumber Daya Manusia
Biro Umum
Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama